



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN



Kemenkum Kalsel News

E-Buletin Edisi Pekan Kedua November



**Kemenkum Kalsel Gelar
Rakor Penguatan
Posbakum**



**Kemenkum Kalsel Ikuti
Technical Meeting
Maturitas KI**



**Kemenkum Kalsel Hadiri
Peresmian Kindai Lapas
Perempuan Martapura**



kalsel.kemenkum.go.id





10 November 2025

Pahlawanku Teladanku: Kemenkum Kalsel Kobarkan Semangat Perjuangan Lewat Upacara Hari Pahlawan 2025



Banjarmasin, Humas_Info - Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian Kalimantan Selatan menyelenggarakan upacara bersama yang berlangsung khidmat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, Senin (10/11).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kanwil Ditjen Keimigrasian Kalsel Yan Wely Wiguna memimpin jalannya upacara dan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, dengan tema "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan."

Dalam amanatnya, Menteri Sosial mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Ia menekankan bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan hasil dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan para pejuang.

"Terdapat tiga teladan utama dari para pahlawan bangsa, yakni kesabaran, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya, dan pandangan jauh ke depan," demikian disampaikan dalam amanat tersebut.

Upacara diikuti oleh para pejabat manajerial dan non-manajerial serta seluruh pegawai dari kedua kantor wilayah. Seluruh peserta tampak khidmat mengikuti rangkaian upacara, yang dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks UUD 1945, dan pesan-pesan pahlawan.

Pada pelaksanaan upacara kali ini yang bertugas yakni Hairil Fahmi selaku Perwira Upacara, Eko Herdianto sebagai Komandan Upacara, serta Jubaida sebagai Pembawa Acara, Muhammad Rezki Kusuma membacakan doa, Nizar Al Farisy membacakan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Muhammad Novi Saputra membacakan pesan-pesan pahlawan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan semangat seluruh peserta upacara.

"Momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa semangat juang tidak berhenti pada masa lalu. Sebagai abdi negara, kita harus terus bergerak, melanjutkan perjuangan melalui pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Dengan semangat Hari Pahlawan 2025, keluarga besar Kemenkum Kalsel dan Kanwil Ditjen Keimigrasian Kalsel berkomitmen untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan, memperkuat integritas, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.





10 November 2025

Wujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Akuntabel, Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda Barito Kuala

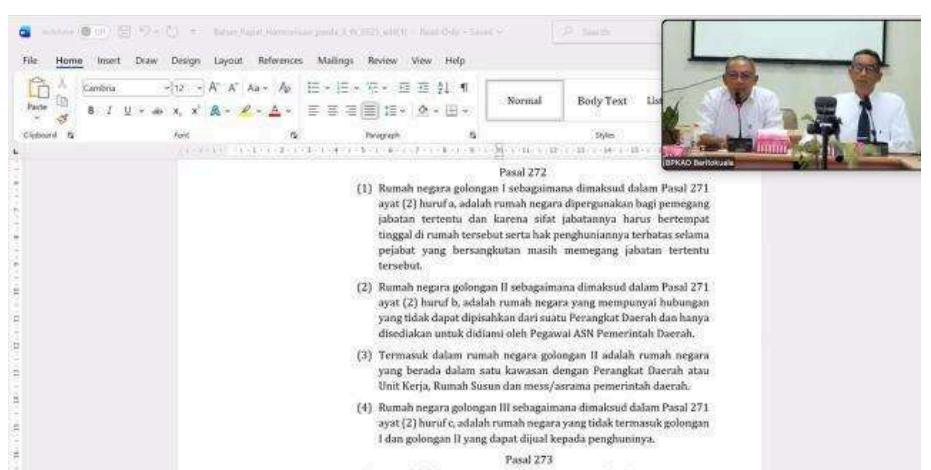
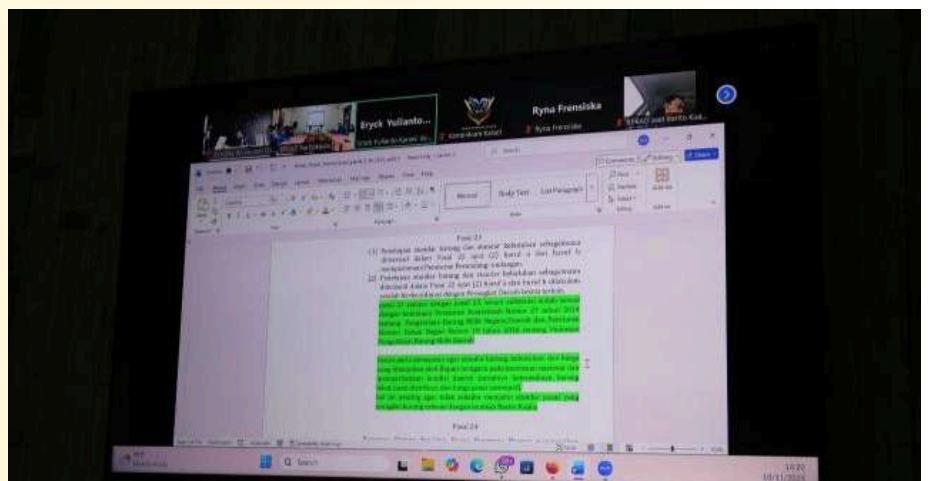


Banjarmasin, Humas_Info— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan harmonisasi secara daring bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dipimpin oleh Eryck Yulianto, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, didampingi jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah melalui ruang rapat Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Harmonisasi ini membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang sebelumnya telah diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui surat bernomor 100.3/679/SETDA/2025 tertanggal 22 Oktober 2025.

Dalam pelaksanaannya, jajaran perancang aktif memberikan masukan dan saran terhadap substansi Ranperda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip pembentukan peraturan yang baik.

Melalui kegiatan harmonisasi ini diharapkan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan aset daerah secara transparan, efisien, dan akuntabel.





10 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Penutupan Orientasi PPPK PJJ Tahun 2025 Secara Virtual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penutupan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, pada Senin (10/11/2025) secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini menjadi penutup dari rangkaian orientasi yang telah berlangsung sejak 20 Oktober hingga 10 November 2025, dan diikuti oleh peserta PPPK dari seluruh unit utama serta kantor wilayah Kementerian Hukum di Indonesia.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Tim Kerja SDM, jajaran, serta PPPK penuh waktu yang baru ditempatkan di lingkungan Kemenkum Kalsel.

Kegiatan orientasi secara resmi ditutup oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas semangat dan kedisiplinan selama pelaksanaan orientasi. Ia menekankan bahwa orientasi bukan hanya proses administrasi, tetapi juga pembentukan karakter ASN Kemenkum yang berintegritas, profesional, dan berkomitmen terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan berpesan agar para PPPK yang baru bergabung dapat segera beradaptasi serta memberikan kontribusi nyata bagi satuan kerja.

“Orientasi ini menjadi langkah awal bagi para pegawai untuk memahami nilai-nilai dasar ASN, menanamkan semangat profesionalisme, serta membangun budaya kerja yang berintegritas sesuai dengan nilai PASTI dan BerAKHLAK,” ujar Kakanwil.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan ditutup dengan doa bersama, menandai berakhirnya proses orientasi yang menjadi awal pengabdian para PPPK di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.





11 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Technical Meeting Tindak Lanjut Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Technical Meeting tindak lanjut pembahasan hasil pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual (KI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Selasa (11/11/2025) bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, termasuk Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Riswandi, bersama tim Pelayanan KI.

Rapat yang dipimpin oleh tim DJKI tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan penyelarasan data hasil pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah. Dalam kesempatan itu, DJKI memaparkan tahapan pelaksanaan pengukuran mulai dari survei, proses verifikasi, hingga penyusunan laporan akhir.

Verifikasi dilakukan secara hybrid dan menjadi dasar evaluasi kinerja masing-masing Kantor Wilayah. Selain itu, DJKI juga memberikan rekomendasi peningkatan kinerja melalui optimalisasi pencatatan dan pendataan komunal, penguatan koordinasi antar unit, serta pemantauan terhadap indikator yang masih rendah.

Peserta rapat turut menerima penjelasan mengenai tata cara penginputan dan penyempurnaan data hasil pengukuran, termasuk mekanisme pelaporan capaian Maturitas KI melalui sistem pelaporan daring.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi tanya jawab dan klarifikasi teknis antara peserta dan tim DJKI, serta diakhiri dengan penyampaian rencana tindak lanjut untuk penyelarasan data sebelum batas waktu pelaporan nasional.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan dapat semakin optimal dan selaras dengan kebijakan nasional DJKI.





11 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Monitoring dan Evaluasi Survei Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Pengelolaan SDM mengikuti kegiatan Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK melalui Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Selasa (11/11) secara virtual.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam memperkuat penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di seluruh satuan kerja, sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil survei pelaksanaan nilai-nilai tersebut selama tahun 2025.

Survei Core Values ASN BerAKHLAK dilakukan secara nasional untuk menilai sejauh mana internalisasi nilai-nilai dasar ASN telah membentuk perilaku kerja yang profesional, berintegritas, dan melayani. Hasil survei digunakan sebagai bahan penyusunan strategi pembinaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum.

Dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, kegiatan ini diikuti oleh Tim Kerja Pengelolaan SDM. Tim menyampaikan bahwa pelaksanaan nilai-nilai BerAKHLAK di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel telah diterapkan secara konsisten melalui berbagai program internalisasi budaya kerja, peningkatan kapasitas ASN, serta kegiatan pelayanan publik berbasis nilai integritas dan kolaborasi.

Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM Kanwil Kemenkum Kalsel, Eko Herdianto yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pionem menyampaikan komitmen untuk terus mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan profesionalitas.

“Kami berupaya agar nilai-nilai BerAKHLAK tidak hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga menjadi karakter yang melekat dalam setiap insan Kemenkum Kalsel. Dengan budaya kerja yang kuat, kualitas pelayanan publik akan semakin meningkat,” ujarnya.

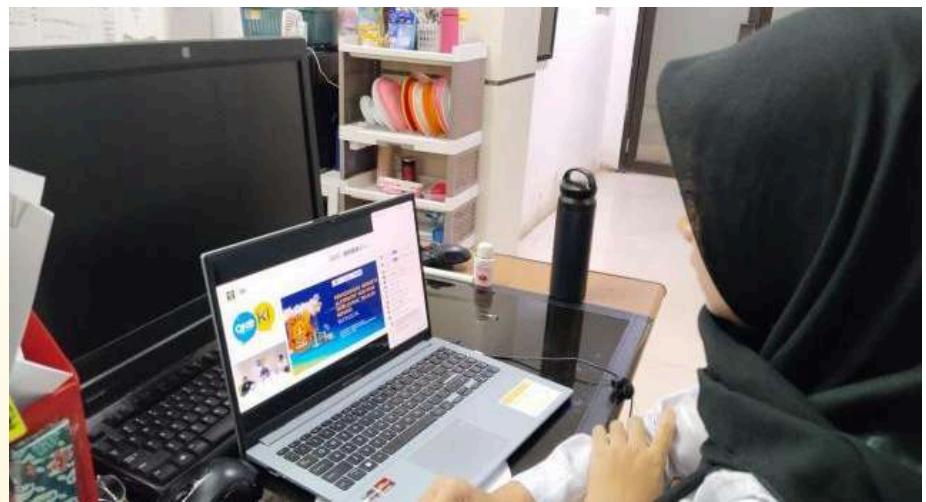
Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)





11 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar OKE KI Seri #36 Bahas Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan Webinar Obrolan Kreatif dan Edukatif Kekayaan Intelektual (OKE KI) seri #36 dengan tema “Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual”, Senin (10/11).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) Kementerian Hukum RI ini diikuti oleh ASN dan pegawai Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Baby Mariaty, Kasubdit Pencegahan dan Sengketa Alternatif DJKI, serta R. Tarto Sudarsono, Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam paparannya, Baby Mariaty menjelaskan bahwa penerapan Restorative Justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual (KI). Pendekatan ini berfokus pada pemulihian keseimbangan antara perlindungan hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, R. Tarto Sudarsono menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penegakan hukum KI, khususnya antara DJKI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kolaborasi ini dinilai krusial dalam menangani pelanggaran Kekayaan Intelektual yang melibatkan lintas negara, seperti kasus pemalsuan merek dan penyelundupan barang berindikasi pelanggaran KI.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini juga diwarnai dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber, membahas praktik penerapan Restorative Justice di berbagai sektor Kekayaan Intelektual.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi sarana peningkatan wawasan bagi pegawai dalam memahami alternatif penyelesaian sengketa KI yang lebih berkeadilan.

“Pendekatan Restorative Justice membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan solutif, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam melindungi hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, memberikan apresiasi atas partisipasi aktif jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh DJKI.

“Pemahaman tentang Restorative Justice menjadi bagian penting dari upaya kita mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanfaatan. Saya berharap wawasan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan,” tutur Alex.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memperluas kolaborasi dalam penegakan hukum serta pelayanan KI yang responsif dan berkeadilan bagi masyarakat.

The collage includes the following elements:

- DJKI Logo
- OKE KI Logo
- A photograph of three people seated around a table during the webinar.
- A document titled "Tingkat Pelanggaran KKI" (Level of IPR Violations) for 2025, which includes:
 - A world map showing countries categorized by their level of IPR violations.
 - A "Watch List" of countries: Algeria, Barbados, Belarus, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Guatemala, Mexico, Pakistan, Paraguay, Peru, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan, and Vietnam.
 - A "Priority Watch List" of countries: Argentina, Chile, China, India, Indonesia, Russia, and Venezuela.
 - A section titled "DAFTAR NEGARA YANG DINILAI MEMILIKI TINGKAT PELANGGARAN KKI YANG CUKUP BERAT (STATUS INDONESIA PADA SPECIAL 301 REPORT BY USTR TAHUN 2024)".



12 November 2025

Kemenkum Kalsel Kukuhkan Notaris Pengganti untuk Banjarmasin dan Tabalong



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris Pengganti pada Rabu (12/11/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah. Pelantikan tersebut dipimpin secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), dua Notaris di Kota Banjarmasin, Gaby Siantori, S.H., M.H. dan Afred Kusuma, S.H., M.Kn., memperoleh izin cuti, dengan penunjukan Theresia Insani Widiasuti, S.H. dan Amalia Aryani, S.H., M.Kn. sebagai notaris pengganti selama masa cuti berlangsung. Sementara itu, di Kabupaten Tabalong, Dr. Yudha Alfiani, S.H., M.Kn. diberikan cuti, dengan Syamsul Arifin, S.H., M.Kn. ditunjuk sebagai notaris pengganti.

Dalam sambutannya, Meidy Firmansyah menegaskan bahwa pelantikan notaris pengganti bukan sekadar seremoni formal, melainkan wujud hadirnya negara dalam menjamin keberlangsungan pelayanan hukum bagi masyarakat. Ia berpesan agar para notaris pengganti menjalankan tugas dengan profesional, menjunjung tinggi integritas, dan mematuhi kewajiban pelaporan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari akuntabilitas profesi.

Acara turut dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kantor Wilayah, perwakilan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tabalong, serta pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelantikan ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada notaris pengganti yang baru dilantik.





12 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Koordinasi Pengisian Matriks Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Pelaporan mengikuti kegiatan koordinasi pengisian Matriks Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara daring pada Rabu (12/11).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengendalian kinerja dan refleksi akhir tahun 2025, sekaligus langkah awal penyusunan perencanaan dan target kinerja Kementerian Hukum untuk tahun anggaran 2026.

Pengisian matriks rencana aksi merupakan implementasi nyata akuntabilitas kinerja dan penguatan budaya perencanaan berbasis hasil. Melalui forum daring ini, seluruh satuan kerja diminta untuk memastikan pengisian matriks rencana aksi melalui tautan resmi yang telah disediakan, paling lambat 21 November 2025.

Tim Kanwil Kemenkum Kalsel turut berpartisipasi dalam sesi diskusi dan penyamaan persepsi terkait penyusunan indikator kinerja utama, langkah strategis, serta target output dan outcome di tingkat wilayah.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi vertikal antara pusat dan daerah, dalam rangka memastikan setiap satuan kerja memiliki arah perencanaan yang konsisten dan selaras dengan prioritas nasional di bidang hukum dan pelayanan publik.





12 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Peresmian Kindai Lapas Perempuan Martapura oleh Dirjen Pemasyarakatan



Martapura, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri kegiatan Peresmian Kindai Lapas Perempuan Martapura, Rabu (12/11/2025). Kegiatan ini diresmikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Mulyadi, melalui prosesi penggantian pita sebagai tanda dimulainya operasional Kindai Lapas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, yang turut menyaksikan prosesi peresmian bersama jajaran pemasyarakatan se-Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Rustam Sakka menyampaikan apresiasi atas inovasi Lapas Perempuan Martapura yang menghadirkan Kindai Lapas sebagai bentuk peningkatan kualitas pembinaan bagi warga binaan dengan sentuhan nilai-nilai budaya lokal Banjar.

“Kindai Lapas menjadi simbol inovasi yang berakar pada kearifan lokal, memperlihatkan bahwa pembinaan di pemasyarakatan tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga pada nilai budaya dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Peresmian ditandai dengan penggantian pita oleh Mulyadi, disaksikan oleh para tamu undangan dan jajaran pemasyarakatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antarunit pelaksana teknis di lingkungan Pemasyarakatan Kalimantan Selatan dalam menciptakan layanan pembinaan yang inovatif dan humanis.





12 November 2025

Kemenkum Kalsel Kukuhkan Anggota MPDN Banjar dan Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Banjar serta Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDMA) Ahli Pertama, bertempat di Aula Kantor Wilayah, Rabu (12/11).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam memperkuat tata kelola profesi kenotariatan dan manajemen sumber daya manusia aparatur.

“Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki peran strategis dalam membina, mengawasi, dan menegakkan ketentuan dalam profesi kenotariatan. Di era digitalisasi hukum dan akta elektronik, MPDN dituntut untuk lebih adaptif, responsif, serta memahami dinamika hukum yang terus berkembang,” ujar Alex.

Ia menegaskan, MPDN tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas, melainkan ujung tombak pengawasan notaris yang paling dekat dengan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan harus mampu menjaga integritas profesi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi publik.

Adapun pejabat yang dilantik sebagai Anggota MPDN Kabupaten Banjar yakni Tati Yuliati dan Retna Mahanani Kartadipura, sementara jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama diemban oleh Mardaniaty Rahmi.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan pentingnya MPDN melakukan pemantauan aktif terhadap status notaris, termasuk yang akan pensiun atau meninggal dunia, agar penunjukan pemegang protokol dapat dilakukan secara cepat dan tertib untuk mencegah kekosongan administrasi hukum serta dalam menindaklanjuti pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Pada kesempatan yang sama, Alex Cosmas Pinem juga menyoroti peran strategis pejabat fungsional Analis SDM Aparatur di tengah transformasi manajemen ASN yang digencarkan pemerintah melalui penerapan sistem merit dan digital talent management system.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi wujud komitmen organisasi untuk memperkuat tata kelola SDM aparatur. Seorang analis SDM dituntut tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga mampu menganalisis kompetensi, memetakan kebutuhan pelatihan, dan mendorong kinerja berbasis data,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Alex menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia berharap amanah yang diterima dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian untuk mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif, dan dipercaya masyarakat.





12 November 2025

Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bahas Propemperda 2026 dan Grand Design Pembangunan Kependudukan



Banjarmasin, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, serta berbagai unsur lembaga dan instansi vertikal, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Agenda rapat paripurna kali ini mencakup pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2045, serta penyampaian pendapat akhir Gubernur terhadap Ranperda tersebut.

Rapat diawali dengan penyampaian laporan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengenai hasil penyusunan Propemperda Tahun 2026 yang berisi daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada tahun mendatang.

Selanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Grand Design Pembangunan Kependudukan memaparkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan jangka panjang di Provinsi Kalimantan Selatan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Setelah paparan selesai, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD, menandai disahkannya kesepakatan atas Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2045.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi kepada DPRD serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan yang inklusif. Gubernur turut menyampaikan beberapa hal terkait kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah, pelaksanaan program Membangun Banua Gotong Royong (MBG), serta komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Rapat ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan penegasan bahwa hasil pembahasan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan daerah melalui regulasi yang terencana dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, merupakan bentuk dukungan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Divisi P3H, ed: Eko/Devin)





12 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Kota Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) turut berpartisipasi dalam Rapat Tim Satgas Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah Tahun 2025 yang digelar di Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (12/11).

Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai unsur instansi pemerintah daerah, aparat keamanan, serta perwakilan instansi vertikal, termasuk dari Kemenkum Kalsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, bersama tim Help Desk AHU.

Rapat Tim Terpadu ini membahas langkah strategis dalam pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kalimantan Selatan. Fokus utama rapat adalah peningkatan kewaspadaan serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan aktivitas ormas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Dewi Woro Lestari menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 170 Ormas yang terdaftar di Kalimantan Selatan. Ia menambahkan, beberapa ormas dalam proses pelaporannya juga melakukan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) guna memastikan legalitas dan kejelasan status kelembagaannya agar tidak tumpang tindih dengan lembaga adat.

“Peran Kemenkum tidak hanya mencatat keberadaan Ormas, tetapi juga memastikan agar setiap Ormas berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum serta berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Dewi.

Selain pemaparan data dan penguatan sinergi, rapat juga membahas isu kemunculan Serikat Tahanan Politik Indonesia (SPPI) sebagai Ormas baru yang perlu mendapat perhatian dan pemantauan bersama. Tim Terpadu melakukan koordinasi untuk memperjelas peran masing-masing satuan tugas, baik dalam aspek pencegahan, intelijen, penindakan, maupun rehabilitasi.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banjarbaru bersama instansi terkait menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas sosial di masyarakat.

Kehadiran Kemenkum Kalsel dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan aktif terhadap pengawasan Ormas dan sinergi bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi investasi serta pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang AHU, ed: Eko/Luthfi)





12 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan

Banjarmasin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) secara daring melalui Zoom Meeting, pada Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dr. Dulyono, S.H., M.H., yang dalam arahannya menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan pewarganegaraan di seluruh Kantor Wilayah serta memperkuat koordinasi dalam proses verifikasi dan penyelesaian permohonan kewarganegaraan.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan layanan pewarganegaraan harus dilakukan secara cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan transparansi pelayanan publik. Melalui rapat ini, Ditjen AHU juga mendorong percepatan proses penerbitan keputusan pewarganegaraan sebagaimana menjadi perhatian khusus dari Menteri Hukum.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, beserta tim layanan pewarganegaraan Kanwil Kemenkum Kalsel, yang turut berperan aktif dalam sesi pembahasan dan penyampaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pewarganegaraan.

“Langkah tindak lanjut yang dibahas hari ini menjadi pedoman bagi seluruh Kantor Wilayah dalam memperbaiki tata kelola administrasi kewarganegaraan, agar layanan yang diberikan semakin cepat, akuntabel, dan memenuhi prinsip pelayanan prima,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola administrasi layanan pewarganegaraan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional dan regulasi yang berlaku. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang AHU, ed: Eko/Devin)





13 November 2025

Kemenkum Kalsel Dukung Optimalisasi MPIG Kayu Manis Loksado Pasca Sertifikasi Indikasi Geografis



Hulu Sungai Selatan, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berpartisipasi dalam kegiatan Diskusi AKRAB untuk Optimalisasi MPIG Kayu Manis Loksado Pasca Sertifikat Indikasi Geografis, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada Selasa (11/11) di Kecamatan Loksado.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi berbagai pihak, termasuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado, untuk membahas langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan daerah tersebut setelah resmi memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG).

Dalam diskusi yang berlangsung secara santai dan interaktif, Bappedalitbang HSS menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan masyarakat dalam menjaga kualitas serta memperluas pasar Kayu Manis Loksado yang dikenal memiliki aroma khas dan nilai ekonomi tinggi.

Sebagai narasumber, Ramlan Harun menyampaikan pandangannya terkait upaya pemanfaatan potensi Kayu Manis Loksado secara maksimal. Ia menekankan pentingnya menjaga mutu produk, memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan, serta mempertahankan kekhasan aroma Kayu Manis Loksado agar tetap menjadi pembeda di pasar nasional maupun internasional.

Sementara itu, M. Aji Rifani menyoroti pentingnya strategi promosi melalui media digital. Ia mengusulkan agar MPIG bersama pemerintah daerah dapat memanfaatkan media sosial dan platform daring untuk memperluas jangkauan pemasaran.

“Sertifikat IG bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya bersama untuk menjadikan Kayu Manis Loksado sebagai identitas kebanggaan daerah dan sumber ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penguatan kelembagaan MPIG, peningkatan strategi promosi berbasis digital, serta kolaborasi lintas instansi dalam mendukung keberlanjutan pengembangan Kayu Manis Loksado.

Partisipasi Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian dan pengembangan kekayaan intelektual daerah, khususnya Indikasi Geografis, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. (Humas Kemenkum Kalsel, Kontributor: Bidang KI, ed: Eko/Luthfi)





13 November 2025

Kemenkum Kalsel Dukung Penguatan MPIG Kayu Manis Loksado untuk Dorong Nilai Ekonomi Daerah



Loksado, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) turut berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Optimalisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Pemanfaatan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Kecamatan Loksado.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya MPIG Kayu Manis Loksado, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten HSS, Dinas Pertanian Kabupaten HSS, serta Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten HSS.

Dalam sambutannya, pihak Bappedalitbang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, MPIG, dan lembaga teknis terkait dalam menjaga kualitas serta reputasi Kayu Manis Loksado sebagai produk unggulan yang telah mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum. Sertifikat IG tersebut menjadi aset penting dalam memperkuat daya saing dan nilai ekonomi produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kegiatan bimbingan ini terbagi dalam tiga sesi utama. Pada sesi pertama, Aji Rifani memaparkan materi tentang Penguatan Kelembagaan MPIG dan Tata Kelola Produk Berbasis IG, dengan menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang profesional, pencatatan anggota, dan penerapan standar mutu sesuai Dokumen Deskripsi IG. Ia juga mengingatkan perlunya pelatihan berkelanjutan bagi anggota MPIG untuk menjaga konsistensi kualitas produk.



Selanjutnya, Markus membawakan materi mengenai Sinergi Lintas Dinas dalam Pengembangan Produk IG, yang menegaskan komitmen berbagai instansi dalam mendukung pemasaran, pengawasan mutu, dan fasilitasi pengembangan produk turunan Kayu Manis Loksado.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyusunan rencana aksi bersama, peningkatan kapasitas SDM MPIG, serta optimalisasi penggunaan logo Indikasi Geografis pada produk dan kemasan sebagai bentuk identitas dan jaminan mutu.

Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan MPIG dan memastikan keberlanjutan perlindungan hukum terhadap produk lokal berindikasi geografis di Kalimantan Selatan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kayu Manis Loksado sebagai komoditas khas daerah yang mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Loksado dan sekitarnya. (Humas Kemenkum Kalsel, kontributor: Bidang KI, ed: Eko/Devin)





13 November 2025

Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (13/11), di Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan uji kompetensi teknis ini diikuti oleh peserta dari berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dari Kalimantan Selatan diikuti oleh Muhammad Fiqreza Arham dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Ujian dilaksanakan secara elektronik dengan metode paper-based test (PBT) untuk Ujian Pengetahuan Umum dan Ujian Pengetahuan Khusus.

Pelaksanaan di wilayah Kalimantan Selatan difasilitasi oleh tim Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan sistem pembinaan jabatan fungsional perancang yang profesional dan berintegritas. Uji kompetensi ini merupakan tahapan penting dalam menjamin standar profesionalisme bagi para perancang peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud perancang yang memiliki kompetensi teknis memadai dalam proses pembentukan peraturan yang berkualitas dan sesuai prinsip hukum.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra, dalam surat pemanggilan resminya menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum yang mendukung reformasi birokrasi di bidang peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

“Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan uji kompetensi berjalan lancar dan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan karier perancang yang harus terus kita jaga kualitasnya,” ujar Alex.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan peran aktif dalam fasilitasi dan pengawasan kegiatan teknis bidang peraturan perundang-undangan, sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur hukum di seluruh Indonesia. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Mahdian ed : Eko)





13 November 2025

Kemenkum Kalsel Gelar Rakor Pos Bantuan Hukum, Tegaskan Komitmen Bersama Perkuat Pos Bantuan Hukum di Daerah



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) se-Kalimantan Selatan pada Kamis (13/11/2025) bertempat di Balai Pertemuan Garuda. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari capaian penting Kalimantan Selatan yang berhasil membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, menjadikannya provinsi dengan tingkat pembentukan mencapai 100 persen.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Bagian Hukum Kabupaten dan Kota, serta lembaga pemberi bantuan hukum terakreditasi. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, membahas keberlanjutan, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam memastikan keberlangsungan layanan Posbankum di tingkat akar rumput.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, membuka kegiatan dengan menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam pembentukan Posbankum di daerah masing-masing.

“Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil membentuk Posbankum di setiap desa dan kelurahan. Ini merupakan wujud nyata implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Melalui layanan Posbankum, masyarakat kini dapat mengakses keadilan secara lebih mudah dan terjangkau ketika menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.

Alex menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di setiap desa dan kelurahan merupakan langkah nyata dalam memperluas jangkauan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah strategis dalam memperkuat Posbankum, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sinergi lintas sektor.

Posbankum sendiri memiliki empat jenis layanan utama, yaitu pelayanan informasi dan konsultasi hukum sebagai pusat literasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat, pelayanan mediasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah bersertifikat Non Litigation Peacemaker (NL.P), pelayanan bantuan hukum dan advokasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyuluh hukum, serta pelayanan rujukan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum terakreditasi bagi perkara yang membutuhkan pendampingan litigasi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan di tingkat masyarakat.

“Posbankum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan. Dalam waktu dekat, Kantor Wilayah akan melaksanakan Kick Off Meeting pelatihan paralegal agar masyarakat desa memiliki kemampuan dasar hukum, keterampilan penyelesaian sengketa secara damai, dan pemahaman sosial di lingkungannya,” ujar Anton.

Anton menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 200 paralegal di Kalimantan Selatan yang tersebar di 2.016 desa dan kelurahan. Jumlah ini masih tergolong terbatas sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah daerah untuk mendorong kepala desa dan lurah mengirimkan calon peserta pelatihan paralegal bersertifikat Certified Paralegal Legal Aid (C.P.L.A).

Ia juga menambahkan bahwa di Kalimantan Selatan terdapat 11 lembaga pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi, dengan satu lembaga berstatus Akreditasi A dan sisanya Akreditasi C. Peningkatan akreditasi PBH sangat diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi maksimal, mengingat hanya PBH terakreditasi yang berwenang menyelenggarakan pelatihan paralegal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2021.

Diskusi dalam rapat turut diwarnai dengan berbagai masukan dari perwakilan pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah menyampaikan kesiapan untuk melaksanakan pelatihan paralegal secara klasikal pada tahun 2025, sementara kabupaten dan kota lain seperti Tanah Laut, Banjarbaru, Kotabaru, dan Tabalong merencanakan pelaksanaan secara zonasi maupun daring pada tahun 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan juga menyatakan dukungannya terhadap program ini dengan menyiapkan alokasi dukungan pembangunan melalui program peningkatan kapasitas aparatur desa.

Sementara itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) berbagi pengalaman telah melaksanakan sembilan kali pelatihan paralegal sejak 2023 dengan melibatkan narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Mereka menegaskan bahwa pelatihan paralegal minimal dilaksanakan selama tiga hari dengan kombinasi metode online, offline, maupun hybrid, sesuai kondisi wilayah dan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Dari hasil pembahasan, seluruh peserta rapat menyepakati pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PBH, dan Kementerian Hukum dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas Posbankum. Posbankum juga disepakati sebagai indikator baru dalam penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang menjadi bagian dari upaya pembudayaan hukum di tengah masyarakat.

Menutup kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Alex Cosmas Pinem kembali menegaskan pentingnya komitmen dan sinergi bersama dalam memperkuat pelayanan hukum di daerah.

“Semoga ikhtiar kita bersama dapat benar-benar membantu masyarakat luas memperoleh akses terhadap keadilan dan mewujudkan tatanan masyarakat yang semakin sadar hukum,” pungkasnya.





13 November 2025

Triathlon Jadi Panggung Gemilang Pegawai Kemenkum Kalsel, Kalver Bawa Kontingen Kota Banjarbaru Berjaya di Porprov XII Kalsel



Tanah Laut, Humas_Info – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh salah satu pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Kalveryanus Tamur, yang sehari-hari bertugas sebagai Pengadministrasi Perkantoran, sukses membawa nama harum Kemenkum Kalsel dan Kota Banjarbaru dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang digelar di Kabupaten Tanah Laut.

Pada ajang bergengsi tersebut, Kalveryanus yang berperan sebagai Pelatih Kontingen Triathlon Kota Banjarbaru berhasil meraih 2 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu, hal ini menjadi torehan positif dan kebanggaan bagi kontingen Kota Banjarbaru. Kalver sendiri telah membimbing 13 atlet yang tampil dengan semangat tinggi dan menunjukkan hasil latihan keras mereka selama ini.

Perlombaan cabang olahraga Triathlon berlangsung pada 10–14 November 2025 di Pantai Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, dengan menghadirkan berbagai kategori lomba yang menguji ketahanan fisik dan mental para atlet dalam renang, bersepeda, dan lari.

Atas capaian membanggakan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang mendalam atas prestasi yang diraih pegawainya.

“Prestasi yang diraih Saudara Kalveryanus Tamur menjadi bukti nyata bahwa insan Kemenkum tidak hanya berdedikasi dalam tugas dan pelayanan, tetapi juga mampu berprestasi di bidang olahraga. Ini adalah kebanggaan bagi seluruh jajaran Kemenkum Kalimantan Selatan dan menjadi inspirasi bagi pegawai lainnya untuk terus berkontribusi positif, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja,” ujar Alex.



Lebih lanjut, Alex menekankan bahwa semangat sportivitas, kerja keras, dan ketekunan yang ditunjukkan dalam dunia olahraga sejalan dengan nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang dipegang oleh Kemenkum.

“Kami berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus mengembangkan potensi diri dan menjaga nama baik instansi di berbagai bidang,” tambahnya.

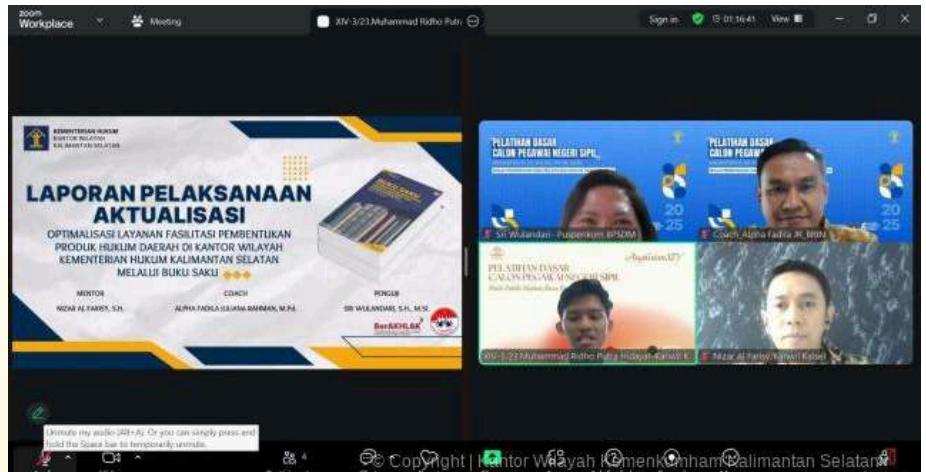
Keberhasilan Kalveryanus Tamur menjadi bukti bahwa semangat juang dan komitmen terhadap keunggulan tidak mengenal batas profesi. Melalui prestasinya, ia tidak hanya mengharumkan nama Kemenkum Kalimantan Selatan, tetapi juga turut memperkuat semangat pembinaan pegawai yang sehat, berprestasi, dan berintegritas.





13 November 2025

16 CPNS Kemenkum Kalimantan Selatan Laksanakan Ujian Aktualisasi Secara Virtual



Banjarmasin_Humas_Info – Sebanyak 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Ujian Aktualisasi secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sebagai syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Ujian aktualisasi menjadi wadah bagi para CPNS untuk memaparkan hasil pelaksanaan proyek aktualisasi yang telah diterapkan di satuan kerja masing-masing. Melalui kegiatan ini, peserta menunjukkan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta kontribusinya dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah memberikan apresiasi atas semangat dan kreativitas para peserta dalam melaksanakan aktualisasi di tempat tugasnya masing-masing. Ia menilai, proyek-proyek yang diusung para CPNS menunjukkan kedulian terhadap perbaikan layanan dan peningkatan efisiensi kerja.

“Saya mengapresiasi seluruh CPNS yang telah berupaya menghadirkan gagasan inovatif dan bermanfaat. Aktualisasi bukan sekadar tugas akademik, tetapi wujud nyata penerapan nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari,” pesan Alex.

Para peserta berasal dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Mereka memaparkan beragam inovasi, mulai dari pengembangan sistem administrasi digital, optimalisasi pelayanan publik, hingga peningkatan efektivitas tata kelola kerja. Seluruh paparan dinilai oleh penguji melalui platform daring.

Melalui pelaksanaan sidang aktualisasi ini, diharapkan seluruh CPNS Kemenkum Kalimantan Selatan dapat menyelesaikan rangkaian Latsar dengan baik dan siap menjadi ASN yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.





13 November 2025

Kemenkum Kalsel Bahas Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bersama Kanwil DJKN Kalselteng



Banjarmasin, AHU_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah, yang dilaksanakan pada Kamis (13/11) bertempat di Aula KPKNL Banjarmasin.

Rapat ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya percepatan penyelesaian permasalahan administrasi dan hukum terhadap aset-aset ABMA/T yang hingga kini masih belum terselesaikan. Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam rangka penertiban status hukum serta optimalisasi pemanfaatan aset negara.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di wilayah kerja terkait, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset, termasuk Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga teknis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, menyampaikan pandangan dan masukan terkait mekanisme penyelesaian aset ABMA/T yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif agar penyelesaian administrasi dan status hukum aset berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum.

“Melalui koordinasi lintas sektor seperti ini, kita harapkan penyelesaian aset ABMA/T dapat dilakukan lebih cepat dan terarah, dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum dan tertib administrasi,” ujar Dewi.

Rapat koordinasi berlangsung dinamis dengan berbagai pembahasan teknis mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang akan dijadikan dasar dalam penanganan aset ABMA/T di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan strategi penyelesaian aset negara yang lebih efektif dan terintegrasi.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antar instansi dalam mendukung pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Sekaligus memperkuat koordinasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan dalam penyelesaian permasalahan aset di daerah.



13 November 2025

Dorong Akuntabilitas Layanan Fidusia, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikut Rapat Koordinasi Satgas PNBP



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan koordinasi terkait pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Jaminan Fidusia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (13/11/2025).

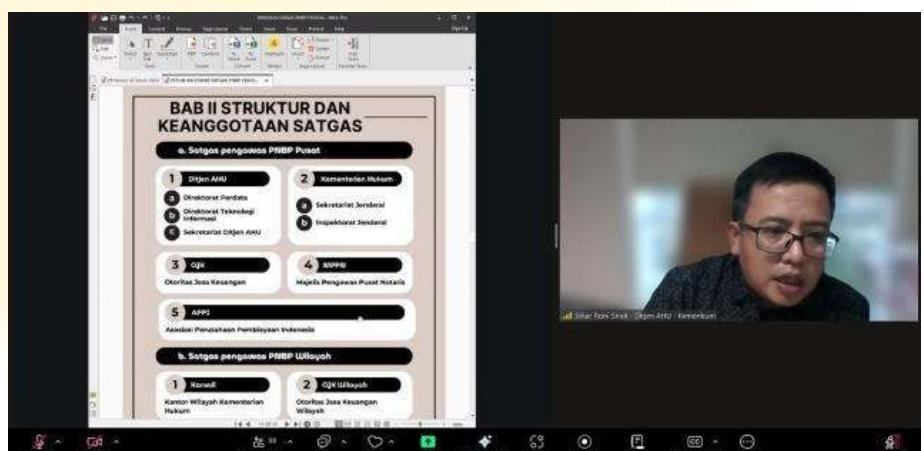
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari bersama tim, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum.

Pembentukan Satgas PNBP Fidusia menjadi langkah strategis Ditjen AHU dalam memperkuat pengawasan dan optimalisasi pengelolaan penerimaan negara dari layanan jaminan fidusia yang merupakan salah satu sumber PNBP terbesar di lingkungan Kementerian Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi dan audit, ditemukan potensi kehilangan penerimaan negara akibat ketidaksesuaian antara data akta fidusia yang dibuat notaris dengan data pendaftaran pada sistem AHU Online.

Melalui Satgas ini, Ditjen AHU berupaya mewujudkan tata kelola layanan fidusia yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Tim Satgas akan beranggotakan unsur pusat dan wilayah yang terdiri dari Ditjen AHU, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Pengawas Notaris (MPN), serta Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Masing-masing unsur memiliki peran koordinatif, pengawasan, dan pelaporan agar mekanisme pengelolaan PNBP berjalan efektif.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas pula mekanisme pelaksanaan tugas Satgas yang meliputi pemantauan, pemandangan data, hingga penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang ditemukan. Selain pengawasan, Satgas juga memiliki fungsi edukasi dan sosialisasi kepada notaris serta lembaga pembiayaan agar memahami pentingnya pelaporan akta fidusia secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi lintas instansi ini, Ditjen AHU berharap tercipta peningkatan transparansi, akurasi data, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan jaminan fidusia. Pembentukan Satgas ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem administrasi hukum nasional.





13 November 2025

Bidang KI Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Gelar Rapat Persiapan Relaksasi Anggaran Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Persiapan Relaksasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (13/11) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, dan diikuti oleh Tim Layanan Kekayaan Intelektual serta Bendahara Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel. Rapat ini membahas langkah-langkah penyusunan dan kelengkapan dokumen relaksasi anggaran, antara lain surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah, SPTJM, surat kesanggupan penyerapan, matriks semula-menjadi, KAK/TOR per rincian output, dan RAB per KRO.

Dalam arahannya, Riswandi menyampaikan bahwa relaksasi anggaran merupakan bagian dari upaya optimalisasi serapan anggaran di lingkungan Kemenkum Kalsel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan usulan agar sesuai dengan batasan dan kriteria yang telah ditetapkan.

Rapat juga menegaskan bahwa tidak diperkenankan menambah item kegiatan di luar usulan yang telah disetujui, serta kegiatan yang telah berjalan sebelum revisi disahkan tidak dapat menggunakan anggaran relaksasi.

Kegiatan berlangsung lancar dan menghasilkan kesepahaman antarunit kerja terkait mekanisme teknis serta pembagian tugas dalam penyusunan dokumen relaksasi anggaran. Tim akan segera menyusun dan melengkapi seluruh dokumen pendukung sebelum disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan selanjutnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sesuai ketentuan.

DATA DUKUNG RELAKSASI ANGGARAN TAHUN 2025

- 1 Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah
- 2 SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah
- 3 Surat Kesanggupan Penyerapan Anggaran
- 4 Matriks Semula-Menjadi Excel
- 5 KAK/TOR per Rincian Output (RO) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah
- 6 RAB per Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah





14 November 2025

Kemenkum Kalsel Dorong Hilirisasi Riset Lewat Workshop Paten, Merek, dan DTLST di ULM



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri Workshop “Peran Paten, Merek, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dalam Hilirisasi Riset dan Inovasi” yang diselenggarakan oleh Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kamis (13/11), di Gedung Lecture Theater Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman civitas akademika serta pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari hilirisasi riset dan inovasi. Perlindungan KI menjadi kunci agar hasil penelitian perguruan tinggi memiliki nilai tambah, dapat dikomersialisasikan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Workshop diawali dengan laporan panitia, dilanjutkan sambutan Kepala LPPM ULM dan sambutan Rektor ULM yang menekankan bahwa hilirisasi penelitian membutuhkan kolaborasi erat antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan sebagai mitra strategis dalam perlindungan KI.

Pada sesi materi, Dr. Nanik Astuti Rahman, S.T., M.T. memaparkan konsep dan urgensi paten bagi hasil riset. Materi kemudian dilanjutkan oleh Umi Yuniati, S.T. yang menjelaskan secara komprehensif mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan relevansinya dalam perkembangan teknologi. Sesi terakhir disampaikan oleh Rizky Mardiyah, S.T. yang membahas peran merek dalam strategi hilirisasi inovasi.

Kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi bersama tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Kalsel dalam sesi diskusi serta memberikan pandangan terkait praktik perlindungan KI yang tepat, prosedur pendaftaran, serta peluang sinergi lanjutan antara Kemenkum dan ULM dalam mendorong peningkatan output KI dari lingkungan kampus.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta budaya penguatan perlindungan KI di perguruan tinggi serta meningkatnya kesadaran para peneliti, dosen, dan mahasiswa untuk mendaftarkan hasil risetnya agar terlindungi oleh hukum dan siap dikembangkan menjadi inovasi yang bermanfaat luas.





14 November 2025

Kemenkum Kalsel Ikuti Diskusi Intensif Bersama OJK dan BPK Terkait Pengelolaan Data Jaminan Fidusia



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Zoom Meeting Diskusi Intensif yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Pada Jum'at (14/11/2025). Kegiatan ini membahas penguatan pengelolaan data Jaminan Fidusia, optimalisasi PNBP, serta pemanfaatan kerja sama pertukaran data dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WITA tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta tim. Diskusi intensif ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan integrasi layanan serta harmonisasi data antarinstansi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan Jaminan Fidusia.

Dalam pemaparannya, narasumber Ditjen AHU menekankan pentingnya peningkatan kualitas data serta optimalisasi layanan melalui interoperabilitas sistem. Salah satu poin pembahasan adalah tindak lanjut kerja sama pertukaran data antara Ditjen AHU dan OJK, termasuk penyusunan Petunjuk Teknis Interoperabilitas Data yang terakhir dibahas pada rapat tanggal 10 September 2025.

Beberapa rekomendasi perbaikan yang disampaikan antara lain: penyesuaian format kolom nomor sertifikat Jaminan Fidusia pada laporan OJK agar selaras dengan format Ditjen AHU, penambahan kolom nomor sertifikat pada laporan LK Bank, serta penambahan elemen data akta fidusia dan nama notaris sebagai bagian dari peningkatan akurasi informasi.

Selain itu, turut dibahas peran Satgas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia. Hasil monitoring dan evaluasi dari Satgas diwajibkan disusun dalam laporan resmi yang menjadi dasar pemberian rekomendasi pemeriksaan maupun sanksi administratif. Laporan tahunan Satgas juga menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan layanan Jaminan Fidusia di tingkat nasional.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas layanan AHU, khususnya melalui pemanfaatan kerjasama data lintas lembaga demi terwujudnya pelayanan Jaminan Fidusia yang lebih akurat, terintegrasi, dan profesional.





15 November 2025

Kemenkum Pastikan Satu dari Tiga Jaringan Pengedar Narkoba Antarprovinsi di Kalimantan Tengah Bukan Pegawainya



Jakarta - Nama Kementerian Hukum (Kemenkum) terseret saat operasi penangkapan jaringan pengedar narkoba antarprovinsi. Satu dari tiga orang tertangkap diduga merupakan pegawai Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah (Kalteng). Menanggapi berita tersebut, Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Ronald Lumbuun, menegaskan bahwa oknum tersebut bukan bagian dari pegawai Kemenkum.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melakukan pemeriksaan internal, bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan pegawai Kemenkum," ujar Ronald di kantor Kemenkum, Jumat (14/11/2025).

Ronald juga menambahkan bahwa Kemenkum selalu menjunjung tinggi dan menanamkan nilai integritas, serta menegakkan tata nilai BerAKHLAK dan PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada seluruh pegawainya.

"Di Kemenkum, kami selalu saling mengingatkan untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sangat disayangkan apabila nama Kemenkum terucap di kasus negatif seperti ini," tutur Ronald.

Ronald pun kembali menegaskan bahwa oknum yang tertangkap dalam pemberitaan bukan bagian dari jajaran Kemenkum.

"Melalui pernyataan ini kami atas nama Kemenkum menegaskan bahwa tidak ada pegawai Kemenkum yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga diharapkan dapat menutup ruang bagi beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat," tegas Ronald.

Pemberitaan bermula dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng menangkap tiga orang jaringan pengedar narkoba antarprovinsi di Kalteng dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga integritas dan mencegah segala bentuk penyimpangan, khususnya terkait peredaran gelap narkotika.

"Kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Setiap informasi yang berpotensi mencemarkan nama institusi harus segera kami klarifikasi, agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. Pada saat yang sama, kami memastikan seluruh pegawai memegang teguh nilai BerAKHLAK dan prinsip kerja PASTI, termasuk melalui pengawasan internal yang ketat serta pembinaan berkelanjutan. Tidak ada ruang toleransi bagi tindakan yang berlawanan dengan hukum dan etika, terlebih yang berkaitan dengan narkoba," tegas Alex.





15 November 2025

Cegah Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Menteri Hukum Supratman Tandatangani ASEAN Treaty on Extradition dan Galang Dukungan Keanggotaan Indonesia pada HCCH



Manila, 14 November 2025 - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas bersama menteri-menteri negara anggota ASEAN hadiri ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) ke-13 di Manila, Filipina. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina.

Setelah proses negosiasi yang panjang sejak tahun 2021, ASEAN Treaty on Extradition akhirnya ditandatangani oleh menteri-menteri negara anggota ASEAN di awal ALAWMM ke-13. Perhelatan monumental ini menandai komitmen negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memberantas kejahatan di wilayah.

"Instrumen hukum yang awalnya diamanatkan dalam Bali Concord pada 24 Februari 1976 ini akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka," tegas Supratman. Ia menambahkan bahwa ia sebagai Menteri Hukum akan mengawal langsung proses ratifikasi ASEAN Treaty on Extradition.

Agenda penting lainnya dalam ALAWMM ke-13 adalah pengembangan kerja sama hukum dalam bidang perdata dan komersial. Supratman menyampaikan fokus Indonesia tahun 2025–2026 untuk menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH) dan mengaksesi beberapa konvensi terkait.

"Indonesia telah mengundangkan Perpres Nomor 98 Tahun 2025 untuk mengesahkan Statuta HCCH dan akan segera menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota HCCH melalui Kementerian Luar Negeri," ujar Supratman.

Oleh karena itu, Indonesia menggalang dukungan dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, sehingga diharapkan proses keanggotaan dapat selesai pada tahun 2026. Dalam pidatonya, Menteri Hukum Supratman berkomitmen, Indonesia segera menyelesaikan proses aksesi Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters untuk menjadi negara ASEAN ke-4 yang menjadi pihak setelah Vietnam, Filipina, dan Singapura. Konvensi ini mempermudah prosedur lalu lintas dokumen judicial dan extrajudicial antara negara anggota.

ALAWMM ke-13 diawali dengan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) ke-24 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo tanggal 10-12 November 2025.

Pada pertemuan tersebut, Widodo menegaskan kesiapan Indonesia bersama-sama dengan negara anggota ASEAN yang sepandangan untuk memulai technical working group guna membahas instrumen hukum mengenai transfer of sentenced persons.

"Komitmen Indonesia dalam technical working group akan berkaitan erat dengan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara," tegas Widodo.

Widodo juga menyambut baik usulan penyusunan compendium yang memuat informasi prosedur dan hukum nasional dalam hal bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata komersial negara anggota ASEAN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah strategis Menteri Hukum RI dalam penandatanganan ASEAN Treaty on Extradition serta upaya penguatan kerja sama hukum lintas negara di kawasan ASEAN.

"Langkah yang diambil Bapak Menteri merupakan momentum penting dalam menutup ruang gerak para pelaku kejahatan lintas negara dan memastikan kawasan ASEAN bukan lagi tempat berlindung bagi mereka. Di tingkat daerah, kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan siap mengawal kebijakan ini melalui peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, khususnya dalam aspek pertukaran informasi, dan pelaksanaan kerja sama hukum internasional. Komitmen Indonesia untuk bergabung dengan HCCH juga membuka peluang harmonisasi layanan hukum perdata dan komersial yang lebih efektif, dan kami siap mendukung penuh agar implementasinya dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat," tegas Alex.



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa

